



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INSPEKTORAT

JLN. KETINGGIAN GOR SINGA HARAU SARILAMAK KAB. LIMA PULUH KOTA

TEL. (0752) 7750555, 7750655 FAKS (0752) 7750655

Pos-el :inspektorat@limapuluhkotakab.go.id, inspektorat.limapuluhkota@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NASVI YARDI, SE, M.Si**
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN SUB KOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUHERMAN, SE**
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, Januari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

SUHERMAN, SE

Pembina TK.1/ IV.b

NIP. 19681225 199703 1 005

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN SUB KOORDINATOR
ANALISIS DAN EVALUASI

NASVI YARDI, SE, M.Si

Penata / III.c

NIP. 19830330 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN MUDA SUB KOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Internal	- Pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT - Terbinanya objek pemeriksaan	90% 43 OPD, 200 sekolah, 79 Nagari, 10 Puskesmas
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan	Penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) dengan status selesai	80%
3	Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Didampingi BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Pihak Eksternal lainnya dalam hal pengawasan/pemeriksaan ataupun urusan terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	4 pihak eksternal
4	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	- Laporan Evaluasi pengawasan dan evaluasi kegiatan Inspektorat	2 Laporan
5	Terlaksananya penyelesaian kerugian Negara/Daerah	- Ditindaklanjuti temuan keuangan (internal dan eksternal) yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah - Ditindaklanjuti kasus pengaduan/kehilangan barang milik daerah	Eksternal : 80% Internal : 80 % 2 Laporan kehilangan daerah
6	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan internal dan eksternal	Ditindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan	95%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	7,923,581,282
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	67,793,150
01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	15,800,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5,421,760,132
01	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp	15,844,000
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	1,500,989,500
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp	1,128,860,000
01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	317,140,000
02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	250,040,000
03	Reviu Laporan Kinerja	Rp	67,495,000
04	Pengawasan Desa	Rp	244,000,000
05	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp	208,418,000
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	372,129,500
01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Rp	101,859,500
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	575,432,150
1	Pendampingan dan Asistensi	Rp	414,038,900
01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	70,189,000

Pihak Kedua
Sekretaris

SUHERMAN, SE

Nip. 19681225 199703 1 005

Sarilamak , Januari 2023

Pihak Pertama
SUB KOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI

NASVI YARDI, SE, M.SI

NIP. 19830330 200901 1 003

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
ANALIS KEBIJAKAN MUDA SUB KOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Internal	- Pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT - Terbinanya objek pemeriksaan	90% 43 OPD, 200 sekolah, 79 Nagari, 10 Puskesmas
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan	Penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) dengan status selesai	80%
3	Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Didampingi BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Pihak Eksternal lainnya dalam hal pengawasan/pemeriksaan ataupun urusan terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	4 pihak eksternal
4	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	- Laporan Evaluasi pengawasan dan evaluasi kegiatan Inspektorat	2 Laporan
5	Terlaksananya penyelesaian kerugian Negara/Daerah	- Ditindaklanjuti temuan keuangan (internal dan eksternal) yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah - Ditindaklanjuti kasus pengaduan/kehilangan barang milik daerah	Eksternal : 80% Internal : 80 % 2 Laporan kehilangan daerah
6	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan internal dan eksternal	Ditindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan	95%

Sarilamak , Januari 2023

SUB KOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI



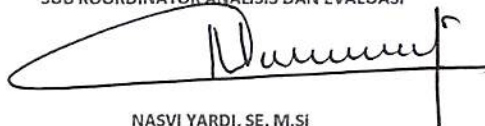
NASVI YARDI, SE, M.Si
NIP. 19830330 200901 1 003

RENCANA AKSI ANALISIS KEBIJAKAN MUDA SUB KOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 PERIODE 2021 - 2026
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2022	PROGRAM		ANGGARAN	KEGIATAN					ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
							URAIAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET (%)					
												TW 1	TW 2	TW 3			TW 4
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Inspektorat	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,923,581,282	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.56	17.90	49.93	27.59	67,793,150	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
										- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.32	6.32	50.02	37.32	15,800,000	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.37	37.35	22.30	17.96	5,421,760,132	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
										- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0.00	33.33	33.33	33.33	15,844,000	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
							Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B (%) - Persentase Pengaduan di Lingkungan Pemda yang terselesaikan - Level Maturitas SPIP	1,500,989,500	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya pengawasan internal	14.70	21.26	28.51	35.51	1,128,860,000	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
										- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10.09	23.64	25.22	41.03	317,140,000	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
										- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	11.99	20.59	32.39	35.01	250,040,000	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
										- Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	100.00	0.00	0.00	0.00	67,495,000	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
										- Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa	14.34	22.54	30.73	32.37	244,000,000	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2022	PROGRAM		ANGGARAN	KEGIATAN					ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
							URAIAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET (%)					
												TW 1	TW 2	TW 3			TW 4
										- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	0.47	13.43	38.21	47.86	208,418,000	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
										Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	4.28	17.98	38.73	38.99	372,129,500	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
										- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK dan Inspektorat (Gelarwasda, TLHP, TPKD/N)	1.27	2.94	63.46	32.31	101,859,500	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	- Level Kapabilitas APIP - Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten yang selesai Ditindaklanjuti	575,432,150	Pendampingan dan Asistensi	- Level Kapabilitas APIP - Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten yang selesai Ditindaklanjuti	14.27	15.94	38.90	30.87	414,038,900	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
										- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	14.24	16.24	38.75	30.75	70,189,000	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi

Sarilamak, Januari 2023
SUB KOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI



NASVI YARDI, SE, M.SI
NIP. 19830330 200901 1 003